

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR : 16 TAHUN 2011

TANGGAL : 31 Mei 2011

**RINCIAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL,
BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	URAIAN		VERIFIKATOR ADMINISTRATIF/ KOORDINATOR	VERIFIKATOR TEKNIS/ SKPD TERKAIT	RENCANA BELANJA (Rp)
A.	Belanja Hibah				61.278.230.000
	A.1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta			16.826.000.000
	A.1.1	Belanja Hibah kepada Bidang Keagamaan			1.025.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	125.000.000
	2	Belanja Hibah kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI)	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	100.000.000
	3	Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat (BAZ)	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	100.000.000
	4	Belanja Hibah kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.000.000
	5	Belanja Hibah Sertifikasi Tanah Wakaf	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	100.000.000
	6	Belanja Hibah Transportasi Pemberangkatan Haji	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	200.000.000

	7.	Belanja Hibah Pengiriman Kafilah MTQ	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	250.000.000
	A.1.2	Belanja Hibah kepada Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			11.450.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dan Cabang Olah Raga	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.800.000.000
	2	Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olahraga	150.000.000
	3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kepemudaan/KNPI	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olahraga	500.000.000
	A.1.3	Belanja Hibah kepada Bidang Keprofesian			500.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah	500.000.000
	A.1.4	Belanja Hibah kepada Bidang Kesehatan			1.800.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan	1.000.000.000
	2	Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan	250.000.000
	3	Belanja Hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial	500.000.000

	4	Belanja Hibah kepada Yayasan Jantung Sehat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial	50.000.000
	A.1.5	Belanja Hibah kepada Bidang Peranan Wanita			1.500.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Organisasi Wanita	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat	500.000.000
	2	Belanja Hibah kepada Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat	1.000.000.000
	A.1.6	Belanja Hibah kepada Bidang Sarana Prasarana			551.000.000
	1	Belanja Hibah Biaya Nilai Tegakan kepada Perum. Perhutani	Bagian Petanahan	Dinas Kehutanan	58.000.000
	2	Belanja Hibah Biaya Investasi JLS kepada Perum. Perhutani	Bagian Kerjasama	Dinas Kehutanan	493.000.000
	A.2	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan			24.812.400.000
	A.2.1	Belanja Hibah Pendampingan Program kepada Kelompok Masyarakat			24.812.400.000
	1	Belanja Hibah PNPM Mandiri Perdesaan	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	5.640.000.000
	2	Belanja Hibah PNPM Mandiri Perkotaan	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	3.145.000.000
	3	Belanja Hibah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)	Bagian Perekonomian	Badan Pemberdayaan Masyarakat	606.000.000

4	Belanja Hibah Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	150.000.000
5	Belanja Hibah Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK)	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat	135.000.000
6	Belanja Hibah Program TMMD Imbangan	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan	1.000.000.000
7	Belanja Hibah Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Bagian Kerjasama	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	41.400.000
8	Belanja Hibah kepada Koperasi untuk Anggota Peternak Sapi Perah	Bagian Perekonomian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	465.000.000
A.3	Belanja Hibah Bidang Pendidikan			29.769.830.000
A.3.1	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan			29.769.830.000
1	Belanja Hibah Pendampingan Program Rintisan Wajar Dikmen 12 Tahun	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	4.104.360.000
2	Belanja Hibah Dana BOS SD/SDLB Swasta	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	4.283.630.000
3	Belanja Hibah Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT/Satap Swasta	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	21.381.840.000
A.4	Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal			3.500.000.000
1	Belanja Hibah untuk Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Fungsional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	3.500.000.000

B.	Belanja Bantuan Sosial				48.016.949.000
	B.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			48.016.949.000
	B.1.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			48.016.949.000
	1	Bantuan Keuangan kepada Perguruan Tinggi	Bagian Kerjasama	Badan Perencanaan Pembangunan	300.000.000
	2	Bantuan Keuangan untuk Keagamaan	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	525.000.000
	3	Bantuan Keuangan kepada Lembaga Pendidikan Swasta	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kantor Kementrian Agama	500.000.000
	4	Bantuan untuk Menunjang Kemitraan Pemerintah Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	30.000.000.000
	5	Bantuan Keuangan untuk Insentif Posyandu (13.655 Kader x 9 bulan x Rp. 12.000,-)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan	1.474.740.000
	6	Bantuan Keuangan untuk Tambahan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial	2.000.000.000
	7	Bantuan Keuangan pada Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.000.000.000
	8	Bantuan Keuangan untuk Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial	1.000.000.000

	9	Bantuan Keuangan untuk Pembinaan Kesenian Budaya	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.000.000.000
	10	Bantuan Keuangan untuk Guru Tidak Tetap dan PTT yang ada di Sekolah (Insentif) 1.508 orang x Rp.500.000,-	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	754.000.000
	11	Bantuan Keuangan untuk Penyandang Masalah Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial	500.000.000
	12	Bantuan Keuangan untuk Organisasi Kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga	500.000.000
	13	Bantuan Keuangan untuk Olah Raga Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olahraga	250.000.000
	14	Bantuan Keuangan untuk Guru terpencil (Rp.600.000,- x 162 orang x 1 tahun)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	97.200.000
	15	Bantuan Keuangan untuk Guru TK Swasta	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	1.783.500.000
	16	- Bantuan UAS SD/MI 38.559 Siswa x Rp. 27.000,- - Bantuan UAS SMP/MTs 32.406 Siswa x Rp. 36.000,- - Bantuan UAS SMA/SMK/MA 7.560 Siswa x Rp. 80.000,- - Dana Pengembangan Sekolah (BOP SMP Satap) 28 Sekolah x Rp. 65.000.000,-	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	4.632.509.000
	17	Bantuan Ongkos Jahit Pakaian Posyandu (Rp. 50.000,- x 14.000 orang)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	700.000.000

C.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				13.347.699.000
	C.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa			13.347.699.000
	C.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa			12.224.828.500
	1	Belanja Bagi Hasil atas perhitungan Pajak Penerangan Jalan Desa/Kelurahan	Bagian Perekonomian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	12.224.828.500
	C.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa			1.122.870.500
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kepada Koperasi dan Provinsi Jatim Tahun 2011	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan	990.000.000
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Terminal Landungsari dengan Desa Tahun 2011	Bagian Pemerintahan Desa	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	60.000.000
	3	Kekurangan Belanja Bagi Hasil TPI ke Koperasi dan Provinsi Jatim Tahun 2011	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.600.000
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pengelolaan STA Mantung dengan Desa Tahun 2011	Bagian Perekonomian	Dinas Pertanian dan Perkebunan	40.000.000
	5	Belanja Bagi Hasil TPI ke KUD Mina Jaya (Kekurangan Tahun 2009)	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.270.500

	6	Belanja Bagi Hasil Kerjasama Pasar Bakroto Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading	Bagian Perekonomian	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	9.000.000
D.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa				96.531.992.000
	D.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa			95.531.992.000
	D.1.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa			95.531.992.000
	1	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat	55.000.000.000
	2	Bantuan Tunjangan Tetap Perangkat Desa:			
	-	Kepala Desa : 1 org x 378 Desa x 12 Bln x Rp. 1.203.000,-	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	5.456.808.000
	-	Perangkat Desa : 3.615 Org x 12 Bln x Rp. 802.000,-	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	34.790.760.000
	-	Pemberian Tali Asih Purna Tugas dan Uang Duka Kepala Desa / Perangkat Desa	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Kepegawaian Daerah	116.424.000
	3	Bantuan Penyelenggaraan Pilkades untuk 28 Desa @ Rp.6.000.000,-	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	168.000.000
	D.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			725.000.000
	D.2.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			725.000.000
	1	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Bagian Tata Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	725.000.000

E.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000.000
	E.1	Belanja Tidak Terduga		5.000.000.000
	E.1.1	Belanja Tidak Terduga		5.000.000.000
	1	Belanja Tidak Terduga	Bagian Administrasi Pembangunan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat 5.000.000.000

BUPATI MALANG,

Ttd.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Mei 2011

H. RENDRA KRESNA

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 6/A

